

**SKRIPSI**

**PENGGUNAAN AIR DANAU SINGKARAK SEBAGAI DANAU  
PRIORITAS NASIONAL UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT  
LISTRIK TENAGA SURYA TERAPUNG DI SUMATERA BARAT**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam  
rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**ANNISA NAZIFA**

**2110111044**

**Program Kekhususan: Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam (PK VIII)**



**Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum  
Sucy Delyarahmi, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2026**

**No. Reg : 06/PKVIII/I/2026**

## ABSTRAK

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di Danau Singkarak merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional dalam upaya transisi energi bersih dan percepatan bauran energi terbarukan di Indonesia. Danau Singkarak yang ditetapkan sebagai Danau Prioritas Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021, menghadapi tantangan dalam aspek hukum dan perizinan pemanfaatan wilayah perairannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kerangka hukum, peraturan perundang-undangan serta tantangan yang dihadapi dalam proses pemberian izin pemanfaatan wilayah perairan Danau Singkarak? 2) Bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat hukum adat dalam proses tersebut? dan 3) Bagaimana pelaksanaan model perizinan yang berkelanjutan dan berkeadilan yang dapat diterapkan? Jenis penelitian ini adalah yuridis-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, komparatif, serta wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perizinan masih mengalami kendala koordinasi antarlembaga, tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta minimnya partisipasi masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi regulasi, pendekatan partisipatif, serta model perizinan yang menjamin keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.

**Kata Kunci:** *PLTS Terapung, Danau Prioritas, Perizinan, Masyarakat Adat.*

